

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Situasi permasalahan itulah yang mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat salah satunya bergerak dalam bidang sosial yang dikenal dengan istilah organisasi nirlaba.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada

Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuannya organisasi dibedakan atas organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non laba atau organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (Sujarweni, 2015)

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan

utama terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam

entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. (PSAK No.45 2011)

Melihat pentingnya laporan keuangan bagi sebuah organisasi- organisasi nirlaba, maka perlu ada suatu aturan baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, IAI mengeluarkan PSAK mengenai organisasi nirlaba yaitu PSAK No. 45.

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah Desa Jinggotan adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dalam Islam Madrasah Ibtidaiyah ini sama dengan sekolah dasar yang berpedoman pada agama Islam atas proses belajar mengajarnya. MI MH Jinggotan merupakan sebuah lembaga yayasan pendidikan islam yang berdiri sudah lama tepatnya pada tanggal 19 Desember 1952. Sehingga ada beberapa madrasah baru yang menginduk ke MI MH Jinggotan ketika akan menghadapi ujian, terutama ujian nasional. Berbagai sumber masukan dari Latar belakang Madrasah tersebut, Undang-Undang Pendidikan dan Yayasan, serta PSAK No. 45 memberikan dorongan bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aturan yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan oleh yayasan pendidikan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan pada yayasan ini dan melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada MI Miftahul Hidayah

Jinggotan”

1.2. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan MI Miftahul Hidayah Desa Jinggotan.
2. Penelitian ini terbatas hanya pada penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan pada Organisasi Nirlaba.

1.3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan MI Miftahul Hidayah Jinggotan ?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan MI Miftahul Hidayah sudah sesuai dengan PSAK No.45 ?

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan di MI Miftahul Hidayah Jinggotan.
2. Untuk mengetahui bentuk dan isi laporan keuangan terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 pada laporan keuangan MI Miftahul Hidayah Jinggotan.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pihak Yayasan MI Miftahul Hidayah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada MI Miftahul Hidayah dalam penerapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

b. Bagi para Akamedisi dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan juga dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi mengenai pelaporan keuangan.

c. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan laporan keuangan khususnya dalam hal ini yaitu laporan keuangan pada organisasi nirlaba.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya dalam bidang organisasi nirlaba.